REPOSISI DOKTRIN *GLOBAL MARITIME NEXUS* DI TENGAH RIVALITAS HEGEMONI OBOR VERSUS MAGA

Sukarijanto, SE., MM., CILT., CFS.
Anggota Association of South East Asia Strategic Management Community

Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD), atau dalam bahasa Inggrisnya *Global Maritime Nexus*, pertamakali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Pandangan baru ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional pada periode pertama Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Visi Poros Maritim yang dicetuskan tersebut menitik beratkan pada pembangunan nasional Indonesia yang berbasis pada sektor maritim. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI sebagai doktrin yang bersifat *political assertiveness* kepada dunia bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat dan bermartabat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain dalam memelihara kestabilan dan perdamaian dunia.

Menurut Presiden Jokowi, pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yaitu: (1) Budaya maritim: membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim. (2) Ekonomi maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa. (3) Konektivitas maritim: memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. (4) Diplomasi maritim: optimalisasi soft power dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim. (5) Keamanan maritim: mempersiapkan hard power untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Gagasan sebagai poros maritim bukanlah hal yang baru. Pada tanggal 22 Agustus 2007, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di depan parlemen India menyampaikan pidato yang berjudul "*Confluence of the Two Seas*" yang mengenalkan pertama kali istilah Indo-Pasifik, yang merupakan kawasan laut yang terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bagian Barat dan Tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudera tersebut. Kemudian di bulan November

tahun 2011, Presiden Barack Obama menetapkan kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia* sebagai respons atas China sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi. *Rebalancing* diwujudkan dengan penarikan pasukan AS dari Irak dan dari Afghanistan, serta menambah bobot perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan.

Berkenaan dengan Jalur Sutra Maritim, yang kemudian dipromosikan menjadi slogan baru Negeri Panda itu di berbagai forum internasional, bisa menjadi faktor yang menguntungkan (advantage) bagi Indonesia maupun faktor merugikan (disadvantage) untuk menuju visi PMD tersebut mengingat China merupakan negara yang telah melakukan klaim sepihak kawasan Laut China Selatan (LCS) yang tentunya akan berdampak signifikan terhadap stabilitas wilayah perbatasan maritim Indonesia. Tak pelak, PMD menjelma sebagai doktrin geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika yang berkembang di kawasan tersebut. Mengingat wilayah tersebut menjadi medan perebutan hegemoni negara-negara besar yang tentunya berimplikasi pada kepentingan nasional Indonesia. Konsekuensinya, tentu hal tersebut membuat Indonesia lebih berhati- hati dalam mengelola kebijakan strategi maritimnya.

Di pihak lain, China telah mengubah orientasi politik luar negerinya menjadi lebih agresif kearah pengembangan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur lewat doktrinnya, yakni One Belt One Road (OBOR) yang mana doktrin ini sangat bertolak belakang dengan politik luar negeri era Mao Ze Dong yang berorientasi dan bergantung pada dua ideologi besar yang eksis pada masa itu yakni komunisme dan liberalisme. Hal demikian membuat China semakin terbuka luas bagi negara-negara lain untuk bekerjasama dan mengembangkan perekonomian negaranya. Sesuai dengan tekad Presiden China, Xi Jin Ping, bahwa China akan mendukung segala upaya untuk melindungi kedaulatan dan investasinya untuk mencapai pembangunan dalam skala yang lebih besar.

Pivot Point

George Friedman dalam karyanya "*The Next 100 Years, A Forecast for The-21st Century*" telah memprediksi bahwa episentrum hegemoni politik akan mengalami pergeseran dari daratan Timteng & Eropah ke daratan Asia Pasifik. Gejalanya mulai dirasakan dalam kurun satu dekade belakangan ini dengan menguatnya rivalitas hegemoni Cina versus Amerika Serikat (AS) di wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya amat pesat.

Dari perspektif ekonomi, tak menampik fakta bahwa seiring dengan meningkatnya eksplorasi penemuan sumber-sumberdaya alam di zona perairan LCS telah memantik eskalasi konflik-konflik perbatasan regional sekitarnya. Secara geopolitik, Indonesia dikelilingi kawasan rawan konflik. Zona Asia Tenggara, ketegangan masalah batas zona ekonomi eksklusif antara Vietnam, Philipina, dan Indonesia versus Cina yang secara unilateral mengklaim sebagai batas zona wilayahnya masih

belum menemukan titik kesepahaman. Di Asia Timur Jauh, eskalasi ketegangan antara Korea Utara versus Korea Selatan belum melandai ditambah konflik Cina-Taiwan juga berpotensi meningkatkan eskalasi ketegangan yang dikhawatirkan berujung konflik senjata.

Magnitude kawasan Asia Tenggara, secara ekonomis dan strategis, menjadikan sebagai kawasan yang kian diperebutkan negara-negara besar dalam menanamkan pengaruhnya. Kapitalisasi nilai perdagangan kawasan kini semakin meningkat dan lebih besar daripada kawasan Eropa. Kawasan Asia Tenggara memiliki modal besar untuk pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata dunia. Selain itu, pangsa pasar yang besar, mencapai sekitar 687 juta jiwa, atau memiliki nilai pasar sebanyak 2,3 triliun dolar AS dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,2 triliun dolar AS. Terlebih, wilayah ini juga mengandung sumber daya alam yang signifikan, seperti cadangan minyak dan gas alam yang belum dimanfaatkan sebanyak 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam. Laut China Selatan tentunya juga menyimpan ikan layur, makarel, scraper hitam, teri, udang, kepiting yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat ASEAN. Sehingga, dari perspektif keamanan, mengendalikan LCS memungkinkan China untuk membangun dan memperkuat pangkalan militer, yang dapat digunakan sebagai pertahanan terhadap ancaman regional eksternal.

Di sisi lain, keberhasilan RI sebagai presidensi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang lalu juga menjadi landasan untuk menguatkan visi sebagai negara yang berdoktrin PMD yang secara *decisive* menguatkan kehadiran Indonesia di tengah aktifitas perdagangan intra-Asia dan dunia sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi & perdagangan sehingga mampu mengimbangi menguatnya penetrasi perdagangan dan politik OBOR Cina versus *Rebalancing towards Asia*-nya AS di kawasan yang makin eskalatif ini.

Pasca kemenangan Donald Trump dalam kontestasi pilpres AS, dinilai banyak pengamat dan para akademisi, akan membawa banyak perubahan paradigma, baik aspek ekonomi maupun politik. Berbeda dengan gaya leadership Joe Biden yang cenderung melakukan pendekatan lebih soft dalam kebijakan luar negerinya, Donald Trump cenderung sangat terbuka. Gaya kepemimpinannya sering kali kontroversial dan mengutamakan prinsip "*America First*," berfokus pada kebijakan ekonomi domestik yang cenderung proteksionis dan nasionalis. Trump dikenal dengan slogan "*Make America Great Again*" (MAGA) serta pendekatannya yang tegas, tidak jarang menimbulkan kontroversi karena gaya komunikasi verbalnya yang langsung dan lugas. Setelah kalah dalam pemilihan 2020 dari Joe Biden, Trump tetap aktif di kancah politik, bahkan pada 2024 kembali mencalonkan diri sebagai presiden AS, sampai dengan meraih kemenangannya.

Kini dengan naiknya Trump ke tampuk kekuasaan, menurut para analis, merupakan refleksi keinginan warga AS agar negerinya tampil dominan usai di era Joe Biden yang dinilai "lembek" terhadap China. Menurut Ashley J. Tellis dalam uraiannya yang berjudul "*The Return of U.S-China Strategic Competition*" yang

terdapat dalam buku *Strategic Asia 2020: U.S-China Competition for Global Influence (2020)*, sebelum era Trump AS cenderung bermain aman. Trump-lah yang membuka tirai perselisihan dengan Cina. Sehingga, mengubah pola hubungan dari mitra strategis menjadi pesaing strategis.

Besarnya potensi ekonomi Laut China Selatan yang belum dieksplorasi secara maksimal sangat diminati karena merupakan wilayah strategis perdagangan dengan jalur transportasi yang dilewati berbagai negara, terdapat kekayaan alam minyak dan gas di Natuna, dan kekayaan ikan serta terumbu karang. Dari segi ekonomi, LCS adalah salah satu rute komersial paling vital bagi industri logistik dan rantai pasok global dan merupakan subwilayah ekonomi penting di Indo-Pasifik. Nilai kapitalisasi perdagangan yang melintasi wilayah ini mencapai USD3,37 triliun pada tahun 2016, termasuk 40% dari perdagangan gas alam cair (LNG) global. Tidak mengejutkan, ketika periode pertama Trump di puncak kekuasannya, armada laut negeri Paman Sam kerapkali hilir-mudik unjuk kekuatan seakan "mengolok-olok" sejauh mana kekuatan armada laut China bisa mengimbanginya. Di fase inilah, slogan MAGA ala Trump memiliki artikulasi penolakan kuat atas klaim unilateral China akan hegemoninya di zona LCS.

PMD sebagai *Sovereign Empowerment*

Kini setelah bergabung dengan aliansi ekonomi baru BRICS, Indonesia seakan memantapkan diri dan mendeklarasikan kepada dunia bahwa PMD merupakan pengejawantahan hak Indonesia sepenuhnya sebagai negara berdaulat yang bebas menentukan aliansi ekonomi manapun sebagai mitra strategis tanpa didikte negara lain. Sekaligus, secara asertif meneguhkan kesiapan Indonesia terhadap "ancaman" Trump yang akan mempertimbangkan penerapan tarif tinggi bagi sejumlah negara yang berafiliasi pada kepentingan BRICS.

Dinamika isu-isu politik dan ekonomi yang berpusar eskalatif di kawasan LCS melibatkan pertarungan isu-isu geopolitik yang substantif, yaitu: *Indo-Pasifik* (India dan Jepang) di tahun 2007, *Rebalancing toward Asia* (Amerika Serikat dan Indonesia) di tahun 2011, *Jalur Sutra Maritim* (Tiongkok) di tahun 2013, dan *Poros Maritim Dunia* (Indonesia) di tahun 2014. Dan, juga menunjukkan persaingan politik internasional antara kekuatan besar (great powers), yaitu: Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang untuk memperebutkan akses dan kendali terhadap tiga isu strategis di sepanjang rute pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yaitu: *jalur maritim, ceruk pasar, dan sumber daya alamnya*. Kekuatan-kekuatan besar (great powers) di atas memiliki kekuatan sebagai *counter-deterrence* yang mumpuni untuk bisa bersaing di level regional dan global, yaitu dalam hal: kekuatan militer, kekuatan finansial, dan penguasaan teknologi.

Dengan mempertimbangkan realitas persaingan politik internasional di atas, Indonesia sebagai negara yang secara geografis tepat berada di tengah Indo-Pasifik perlu bersikap akomodatif namun tegas agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari dinamika geopolitik kawasan. Manfaat tersebut bukan terbatas pada aspek kesejahteraan, namun juga manfaat

bagi kebesaran bangsa Indonesia yang sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit telah menjadi *regional hegemony* di Asia Tenggara dengan kekuatan angkatan lautnya yang sangat tangguh dan disegani di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur bahkan melebar sampai dengan kawasan Madagaskar. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menikmati masa-masa kejayaan dengan menguasai jalur maritim antara China dan India, yang sangat mungkin saat ini adalah jalur LCS. Argumen lain menurut Ricklefs, Majapahit sendiri adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Menurut Kakawin Nagarakertagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke China. Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (*M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Edisi ke-3, Serambi, 2005*)

Penguatan kedaulatan bangsa melalui *Sea Power* atau kekuatan laut merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa (Geoffrey, 2004). Sebaliknya, bila kekuatan-kekuatan di laut kurang diberdayakan, akan berakibat sangat merugikan negara atau meruntuhkan bangsa tersebut. A.T. Mahan menyatakan, bahwa kekuatan laut adalah "*All that tends to make a people great upon the sea or by sea*". Contohnya adalah saat kebangkitan kekuatan laut Inggris (British sea power) di masanya. Secara ideal Inggris terletak di persimpangan jalur perdagangan Eropa. Bangsa Inggris mampu memanfaatkan dan mengamankan jalur perdagangannya dari penggunaan laut oleh pihak lawan. Selain daripada itu, posisi geografis Inggris, memberikan proteksi alami dari invasi musuh dan tidak mengharuskan Inggris memiliki kekuatan Angkatan Darat yang besar. (Thayer, 2004).

Dapat diambil pelajaran bahwa keuntungan posisi geografis tidak akan terlihat dominan bila sebuah bangsa tidak memiliki garis pantai yang cukup untuk membangun pelabuhan-pelabuhan, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, dan tidak didukung oleh iklim/cuaca yang baik. Di samping hal tersebut cara pandang serta wawasan kemaritiman dari masyarakat merupakan sumber kekuatan sebuah bangsa. Dengan demikian, PMD secara implisit adalah doktrin yang bersifat ideologis-historis yang merefleksikan kekuatan Indonesia dalam bargaining politik, diplomasi, dan memengaruhi negara lain untuk menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi dan kedaulatan wilayah NKRI.